

## **BAB 2**

### **LANDASAN TEORITIS**

#### **2.1. Kajian Pustaka**

##### **2.1.1. Elit Modern**

Elit modern merupakan sebuah konsep yang direpresentasikan melalui penelitian Robert van Niel yang berjudul “Munculnya Elit Modern di Indonesia”. Elit modern ini merupakan label kelas yang muncul pada era politik etis, ketika masyarakat mampu bertransformasi dari tradisional menjadi modern. Secara prinsip, elit modern adalah sebuah kelas yang kental dengan nuansa dan budaya yang modern. Modern itu sendiri merupakan sebuah gaya hidup atau perubahan baru yang dibawa oleh kaum barat (eropa). Oleh karena itu, modern merupakan konsep yang identik dengan western. Hal itu, dikarenakan adanya beberapa gejala yang memiliki kemiripan diantaranya gaya hidup, pola pikir, dan teknologi. Secara historis, perjalanan transformasi kelas pribumi dari tradisional ke modern tidak hanya bermula dari era politik etis.

Pada zaman politik liberal sekitar tahun 1870, masyarakat pribumi Hindia Belanda sudah menapaki jenjang perubahan baru. Pada saat itu, masyarakat diperkenalkan sebuah sistem pangreh praja. Masyarakat diperbolehkan masuk ke jajaran pemerintahan bersama *binnenlands bestuur*. Setelah itu, masyarakat juga diberi pelatihan sekolah pamong praja agar mampu dipersiapkan untuk menduduki staf pemerintahan. Meski perubahan tersebut belum termasuk ke arah progresif. Namun, perubahan tersebut mampu menstimulan masyarakat untuk mengenal lebih jauh seputar pembaharuan dan pendidikan.

Transformasi tersebut merupakan proses menuju kehidupan sosial dan politik yang modern. Jika menelisik dari kata elit pada konsep elit modern bermakna sebuah kelas atas atau kelas yang berbeda. Secara definisi, baik elit modern dan elit tradisional adalah kelas priyayi yang mampu mencicipi diskursus perubahan seiring terjadinya dinamika politik di Hindia Belanda. Pada elit tradisional, kelas priyayi belum mengenal teknologi, gaya hidup, atau pola pikir modern. Pemerintahan Hindia Belanda saat itu

belum berkeinginan memberi wacana pendidikan bagi masyarakat pribumi. Kelas priyayi mampu bertransformasi ke arah modern pada era politik etis.

Gaya hidup modern juga merupakan sebuah gejala sosial yang terjadi berdasarkan transformasi sosial yang terjadi di masa kolonial. Gaya hidup tersebut biasanya berupa perilaku konsumtif, cara berkomunikasi, cara berpakaian, dan tata prilaku. Selain merepresentasikan gaya hidup modern, penafsiran dari modern juga diarahkan juga sebagai westernisasi. Masyarakat pribumi yang sudah bertransformasi menjadi kelas modern lambat laun mengkonsumsi beberapa budaya barat seperti cara berpakaian dan tata prilaku. Pakaian yang ditiru tersebut biasanya meliputi dasi, kemeja, celana panjang, jas sepatu, dan potongan rambut yang bercorak barat.

Gejala tersebut timbul disaat pemerintahan Hindia Belanda mulai membuka kesempatan masyarakat pribumi untuk mendapat pendidikan barat modern. Dampak yang sangat terasa pada transformasi kelas ke elit modern adalah terciptanya kaum cendekiawan. Kaum cendekiawan lahir ketika elit modern mampu menduduki bangku sekolah modern dan mengimplementasikannya ke kehidupan pribumi. Kaum cendekiawan tersebut menciptakan fondasi baru yang membangkitkan semangat persatuan bagi masyarakat pribumi. Organisasi-organisasi politik yang dimotori oleh elit modern mampu menjadi wadah untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat. Organisasi tersebut memiliki corak yang berbeda berdasarkan organisasi yang diusung.

Tasikmalaya memiliki nuansa konstestasi politik yang cukup intensif jika dibandingkan dengan daerah lainnya. beberapa organisasi yang mampu menancapkan pengaruhnya di Tasikmalaya diantaranya Paguyuban Pasoendan dan Sarekat Islam. Kelas elit modern menempati peran penting dalam pergerakan politik tersebut. Saat itu, kelas elit modern yang diantaranya berprofesi sebagai pedagang, pejabat, dan pemuka agama mampu menapaki jejak modernisasi di Tasikmalaya dengan bergabung ke organisasi politik atau mendirikan sekolah. Pada masa sebelum politik etis, masyarakat Tasikmalaya masih bersifat tradisional.

Mereka cenderung menjunjung tinggi keimanan daripada logika. Lapisan sosial masyarakat Tasikmalaya saat itu didominasi oleh kaum santri. Kaum santri tersebut

sangat lekat dengan konsep milerianisme (Ratu Adil). Mereka menjunjung guru atau ustadz pada lapisan kelas priyayi sebagai juru selamat di saat kolonialisme Hindia Belanda yang dianggap sebagai representasi kafir. Ketergantungan kaum santri dan priyayi membuat diaspora politik di Tasikmalaya berhasil berkembang. Hal itu dikarenakan kelas elit modern tertarik bergabung dengan organisasi politik lainnya dan kaum santri memilih menuruti junjungannya kemanapun pergi (Niel, 1984: 73-78).

Dampak yang ditimbulkan dari munculnya kelas elite modern di Hindia Belanda diantaranya:

1) Keterbukaan Pemikiran

Kelas elite modern merupakan kelas sosial yang merepresentasikan sebuah pemikiran yang progresif dan egaliter. Kelas elite modern biasanya bertolak belakang dengan kelas tradisional yang terkesan kaku. Modernisasi mampu melenturkan arah feodalisme yang sebelumnya terkesan kaku. Hal tersebut nantinya membuka wawasan masyarakat pribumi untuk memandang permasalahan secara kompleks. Munculnya kelas elite modern tersebut mendorong keberagaman pemikiran baru yang lahir dari masyarakat. Salah satu ideologi yang lahir dan memiliki pengaruh besar adalah ideologi nasionalisme.

2) Kolektifitas

Munculnya kelas elite modern memunculkan semangat kolektif atau rasa sepenanggungan. Hal ini dikarenakan, pemikiran yang sudah terbuka atas kelas elite modern mampu menyadarkan masyarakat atas belenggu penderitaan pada masa kolonialisme Belanda. Hal itu juga lah yang mendorong beberapa konsolidasi bersama antar organisasi. Salah satu contohnya adalah menciptakan kongres pemuda yang melahirkan identitas nasional berupa sumpah pemuda.

3) Partisipasi Politik

Kelas Elite modern juga mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam meramalkan khazanah perpolitikan di Hindia Belanda saat itu. Partisipasi politik di

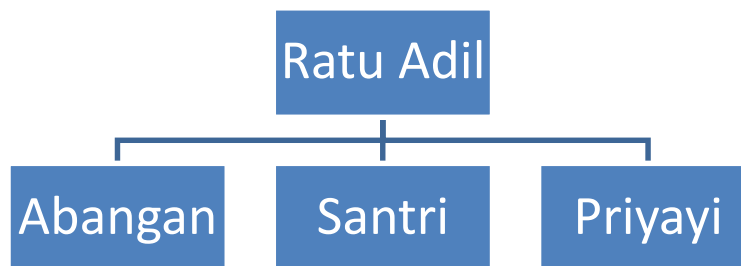
dorong oleh kesadaran politik yang terbangun melalui pemikiran modern. Modernisasi mengambil bagian penuh dalam mendorong masyarakat agar lebih peduli untuk berpartisipasi langsung terhadap keadaan politik saat itu. Bentuk partisipasi politik saat itu diterapkan secara beragam diantaranya melalui kritik dalam surat kabar, penyampaian aspirasi langsung ke bupati daerah, memperjuangkan aspirasi melalui *volksraad*, demonstrasi, mogok, dan pemberontakan. Seluruh tindakan politik yang terjadi pada masa pergerakan tersebut, menandakan masyarakat pribumi mulai tergerak ke arah yang lebih baik.

### **2.1.2. Ratu Adil**

Konsep ratu adil merupakan sebuah konsep tradisional Jawa tentang adanya juru selamat yang mampu memberikan perubahan besar terhadap distopia yang sedang terjadi. Konsep ratu adil terbentuk dari kombinasi kepercayaan lokal dan agama. Hal itulah yang membuktikan kemiripan struktur dengan paham mesianisme dan mahdisme. Ratu Adil dicetuskan oleh Sartono (Kartodirjo, 1984: 51-53) untuk generalisasi struktur perubahan masyarakat tradisional Jawa. Konsep ratu adil ini sudah berkembang secara turun temurun di masyarakat. Selain itu, konsep kebudayaan ini berbentuk semacam ramalan yang tumbuh di masyarakat akan datangnya imam mahdi dan ratu adil. Masyarakat selalu terdorong untuk menghubungkan segala macam permasalahan sosial dengan juru selamat (Ratu Adil). Hal yang menjadi motif masyarakat percaya akan mitos tersebut salah satunya adalah paradigma tradisional.

Pada masa kolonial Hindia Belanda, masyarakat Indonesia masih terkungkung dalam lokus tradisional. Penindasan dan eksploitasi yang dilakukan oleh pemerintahan Hindia Belanda semakin mereduksi perkembangan masyarakat yang tradisional. Masyarakat Indonesia tradisional saat itu belum mampu berpikir kritis dan terbuka. Selayaknya definisi tradisional pada umumnya, masyarakat hanya bisa menginterpretasikan segala penindasan secara mistika, salah satunya melalui kepercayaan akan adanya juru selamat (Ratu Adil) yang mampu memberikan perubahan. Lapisan masyarakat tradisional tersebut menurut Clifford Geertz merupakan

lapisan santri dan abangan. Corak lokal dan agama merupakan 2 konsep vital dalam menggerakkan paradigma masyarakat saat itu (Geertz, 2014: 187-188). Lapisan masyarakat Jawa tradisional menurut Geertz yaitu:



**Gambar 2.1. Ratu Adil**

Kepercayaan akan adanya juru selamat inilah yang membuat struktur masyarakat tradisional masih kental dengan pengkultusan. Konsep Ratu Adil nyatanya tidak sepenuhnya mereduksi sikap kritis dan resistensi dari masyarakat. Pemberontakan petani banten 1888 merupakan salah satu contoh dari besarnya intensitas perlawanan jika berkaitan dengan kepercayaan. Selain pemberontakan petani banten, perlawanan pangeran diponegoro memiliki frekuensi terbanyak dibandingkan perlawanan di nusantara lainnya juga didasari oleh semangat akan adanya juru selamat. Pada konteks politik, konsep ratu adil juga digunakan dalam menarik simpati masyarakat dalam upaya diseminasi ideologi. Sejak perubahan struktur sosial-politik masyarakat pada awal abad 20, pengetahuan politik mulai diterapkan pada kontelasi pendidikan di Hindia Belanda.

Pengetahuan politik tersebut mampu menstimulan masyarakat untuk membentuk organisasi-organisasi politik seperti halnya di negara lain. Organisasi tersebut memiliki corak ideologi yang beragam seperti nasionalisme, islamisme, sosialisme, dan komunisme. Organisasi yang berideologi Islam saat itu menjadi daya tarik bagi khalayak umum. Sarekat Islam pada tahun 1916 sudah menjadi organisasi dengan anggota terbanyak di Hindia Belanda saat itu. Salah satu faktor yang mendukung ketertarikan masyarakat akan ideologi Islam adalah kepercayaan akan adanya Mahdisme/Ratu Adil. Internalisasi wacana Ratu Adil dalam konteks politik

dibawa oleh lapisan priyayi Islam. Berbeda dengan priyayi di bawah abad 20, priyayi pada era politik etis bertransformasi ke arah modern. Priyayi tersebut memiliki kuasa simbolik yang mampu menuntun cara berpikir masyarakat tradisional seperti seorang pengusaha, aparatur pemerintahan, dan pemuka agama (Geertz, 2014: 328). Meski alasan umum yang biasa dijadikan acuan untuk menjelaskan ketertarikan adalah ideologi Islam itu sendiri. Namun, Asumsi peneliti menjelaskan bahwa yang menjadi dasar ketertarikan masyarakat untuk andil dalam konstestasi politik adalah adanya wacana ratu adil yang mampu membawa perubahan. Konsep ratu adil memiliki beberapa perbedaan tafsir baik dalam agama maupun kepercayaan lokal. Adapun bentuk penerapan konsep ratu adil di masyarakat diantaranya:

1) Agama Islam

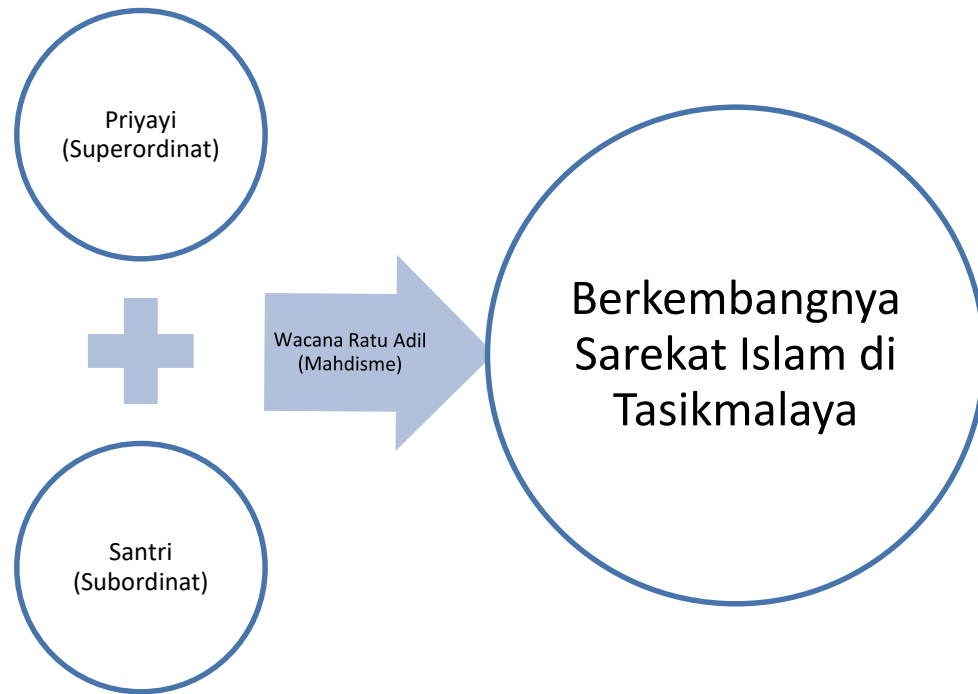
Agama Islam mendefinisikan konsep ratu adil sebagai konsep mahdisme. Hal ini tertuang dalam beberapa ajaran secara turun temurun. Agama Islam percaya akan adanya juru selamat yang mampu membasmi penindasan dari kaum kafir. Mahdisme dalam Islam memiliki kesamaan dengan ramalan ratu adil pada tradisi kepercayaan lokal Jawa dalam hal metafisika. Masyarakat tradisional seyogianya selalu mencoba membenturkan segala hal yang distorsi ke arah mistika. Hal inilah yang memicu harapan dari masyarakat akan datangnya juru selamat dan hari pembalasan. Pada masyarakat lokal daerah di pulau Jawa. Konsep mahdisme selalu diartikan juga sebagai realisasi konsep ratu adil. Khususnya masyarakat sunda, sub-daerah yang terkenal memiliki penganut agama Islam yang kuat juga mencoba mengartikan mahdisme sebagai sosok ratu adil juga.

2) Kepercayaan Jawa

Kepercayaan Jawa atau kejawen merupakan kepercayaan yang turun-temurun dilestarikan oleh suku Jawa. Kepercayaan ini bersifat lokal, historis, kultural, dan mistis. Kepercayaan ini bersifat etika, pandangan hidup, dan adat istiadat. Pada kepercayaan Jawa selalu dikenal dengan ramalan Jayabaya. Ramalan ini mengatakan akan datangnya seorang ratu adil yang bertugas menyelamatkan bangsa Jawa. Sejak ramalan itu lahir, masyarakat Jawa selalu menantikan akan

datangnya sosok ratu adil yang misterius. Terkadang, justifikasi dan kategorisasi seorang ratu adil bersifat sewenang-wenang. Dari perjuangan Diponegoro, sampai masa kepemimpinan Sukarno dianggap sebagai titisan dari ratu Adil.

Sarekat Islam Tasikmalaya memiliki relevansi dengan konsep Ratu Adil. Latar belakang berdirinya Sarekat Islam di Tasikmalaya adalah struktur masyarakatnya yang masih tradisional. Tasikmalaya merupakan sebuah daerah yang memiliki nuansa yang agamis. Hal ini didukung oleh berdirinya beberapa pesantren di Tasikmalaya. Pesantren tersebut mengindikasikan berkembangnya lapisan sosial masyarakat santri. Tidak hanya santri, lapisan sosial yang mendominasi struktur sosial masyarakat Tasikmalaya juga meliputi kaum priyayi. Kaum priyayi meliputi pengusaha, pedagang, pejabat pemerintahan, dan pemuka agama. Priyayi memiliki keterkaitan sebagai superordinasi yang menguasai wacana simbolik dengan kehidupan sosial di Tasikmalaya. Priyayi memiliki dominasi terhadap kaum santri sebagai subordinat dalam hal arah berpikir. Masyarakat santri di Tasikmalaya tersubordinasi oleh kaum priyayi melalui 3 dimensi meliputi ekonomi, sosial, dan agama. Sarekat Islam di Tasikmalaya saat itu mampu melakukan pendekatan terhadap beberapa pimpinan pesantren salah satunya K.H. Sudja'i. Beberapa pengusaha dan pemuka agama menjadi pelecut minat masyarakat untuk bergabung dengan Sarekat Islam. Selain itu, wacana Ratu Adil masih relevan untuk menggambarkan dasar ketertarikan masyarakat yang resah terhadap kolonialisme Hindia Belanda.



**Gambar 2.2. Berkembangnya Sarekat Islam di Tasikmalaya**

### 2.1.3 Partisipan Politik

Masih berhubungan dengan negara-negara baru samuel P. Huntington dan Joan M. Nelson dalam *No Easy Choice: Political participation in Developing Countries* memberi tafsiran yang lebih luas dengan memasukan secara eksplit tindakan ilegal maupun kekerasan. Miriam budiarjo memaparkan secara komprehensif definisi dari partisipasi politik dalam (Budiarjo, 2017: 85) yaitu,

Partisipasi politik adalah kegiatan warga yang bertindak sebagai pribadi-pribadi, yang dimaksud untuk memengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah. Partisipasi bisa bersifat imdividual atau kolektif, terorganisir atau spontan, mantap atau sporadis, secara damai atau dengan kekerasan, legal atau ilegal, efektif atau tidak efektif.

Partisipasi politik mampu melandasi aspek periodisasi pada masa pergerakan nasional. Masa pergerakan nasional membuka kesempatan bagi masyarakat pribumi



untuk terjun ke dunia pendidikan. Kontribusi pendidikan yang dirasakan oleh pribumi memberikan wawasan baru dalam kesadaran politik sebagai warga negara. Berdasarkan hal tersebutlah, terlahirnya momentum partisipasi politik yang secara bertahap terjadi mulai tahun 1908. Partisipasi politik masyarakat pribumi memiliki beberapa andil yaitu berupa turut serta dalam menuangkan aspirasi di *volksraad* dan membentuk organisasi yang bersifat kooperatif atau non kooperatif. Sarekat Islam merupakan salah satu bukti partisipasi politik yang terjadi pada masa pergerakan nasional.

Partisipasi politik secara luas dapat terlaksanakan pada abad ke-15 di benua Eropa. Era sebelumnya, bangsa eropa masih terbatas dalam menuangkan aspirasi politik di ruang publik. Eropa saat itu masih didominasi oleh kebudayaan feodalisme yang terpusatkan pada kerajaan sebagai wadah prerogatif untuk mengatur masyarakatnya. Partisipasi politik masyarakat tersedia di saat memasuki era reformasi atau *renaissance* pada abad ke-15. Era tersebut dilatarbelakangi oleh perubahan paradigma berpikir bangsa Eropa yang lebih modern.

Masyarakat bisa lebih leluasa untuk menyuarakan hak dan kewajibannya pada penguasa. Namun, partisipasi politik yang muncul di Eropa memiliki penerapan yang berbeda dengan negara lainnya. Hal itu, dikarenakan adanya perbedaan di setiap karakter suatu bangsa. Bentuk Partisipasi politik bisa melalui berbagai bentuk seperti secara individu atau kolektif, secara terstruktur atau spontan, matang atau sporadis, kondusif atau represif, partisipatif atau anarkis, legal atau ilegal, dan efektif atau tidak efektif. Setiap bentuk dari partisipasi politik tersebut mengarah pada satu tujuan yaitu kesejahteraan sosial. Secara keseluruhan, banyak yang menjadi faktor penyebab munculnya partisipasi politik pada *civil society*. Myron Weiner mencoba mengklasifikasikan faktor faktor yang mendorong partisipasi politik diantaranya:

#### 1. Modernisasi

Pertumbuhan sosial-ekonomi suatu negara yang disertai intensifikasi seperti dalam bidang pertanian, Industrialisasi, pendidikan, dan infrastruktur akan mendorong masyarakat untuk lebih terbuka untuk mengikuti perkembangan zaman.

Transformasi tersebut terlaksana ketika masyarakat menjadi terbuka akan informasi dan mampu menjejaki partisipasi politik.

2. Perubahan-Perubahan Struktural Kelas Sosial

Terbentuknya kelas baru seperti kelas buruh, kelas terpelajar, dan kelas menengah menambah variasi yang beragam dari demokrasi dalam suatu negara. Perubahan tersebut menyebabkan meratanya partisipasi politik masyarakat, khususnya yang terlibat pada perubahan kelas ke arah yang lebih baik. Selain itu, setiap kelas memiliki rasa kolektif untuk mempertahankan dan menyuarakan hak politik mereka.

3. Pengaruh Kaum Intelektual dan Komunikasi Massa Modern

Kaum Intelektual memiliki pengaruh besar dalam pemerataan partisipasi politik bagi seluruh masyarakat. Kaum intelektual pada era modern selalu menyuarakan humanisme, egaliter, dan nasionalisme. Suara yang diperjuangkan kaum intelektual pada partisipasi politik dilandasi oleh penderitaan yang terjadi pada masa-masa abad pertengahan. Abad pertengahan (biasa disebut *dark ages*) mereduksi kebebasan masyarakat dalam hal kedudukan. Masyarakat saat itu harus patuh betul dengan dogma gereja dan perintah kerajaan. Selanjutnya, Kaum Intelektual yang dimotori oleh beberapa kaum penganut paham liberalisme berhasil mendobrak belenggu masyarakat ke arah 'terbebaskan'.

4. Konflik diantara Kelompok-Kelompok Pemimpin Politik

Masyarakat pada faktor ini dipolitisasi untuk berpoltik atas dasar kepentingan kekuasaan. Politisasi ini bermula saat diberlakukannya sistem demokrasi. Sistem demokrasi tersebut mengharuskan pemerintahan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan oleh rakyat. Namun, sistem itu banyak yang justru menciptakan pluralitas politik yang sifatnya oligarki. Para pelaku politik yang terusung dalam partai politik mencoba mengambil hati masyarakat untuk mendukungnya pada kontestasi pemilu. Inilah salah satu bentuk dari partisipasi politik yang didorong oleh faktor konflik.

5. Keterlibatan Pemerintah

Keterlibatan pemerintah dalam membuat kebijakan biasanya berdampak pada partisipasi politik dari masyarakat. Hal tersebut dapat dilihat pada keterlibatan pemerintahan pada sektor lokal masyarakat. Contoh kecil dari keterlibatan tersebut bisa dilihat dari pembangunan infrastruktur, penyuluhan, dan pemberian bantuan. Masyarakat akan terdorong rasa simpatinya untuk ikut serta dalam menempuh keputusan politik secara bersama. Selain itu, masyarakat juga mulai secara mandiri membentuk forum musyawarah untuk kepentingan bersama.

Berdasarkan pemaparan tersebut, dapat disimpulkan bahwa bentuk partisipasi politik bukan hanya sebatas rasa atau pemikiran yang ada pada setiap individu masyarakat. Namun, Masyarakat juga mampu mengakumulasi rasa dan pemikirannya ke dalam tindakan secara aktual. Seperti halnya dalam sebuah masyarakat ketika menghadapi perubahan kebijakan dari pemerintahan akan berakhir sia-sia ketika masyarakat tidak berani menyuarakan keluh kesah dan pendapatnya. Partisipasi politik mengusungkan sebuah praktik secara nyata dari setiap pribadi masyarakat.

Partisipasi politik pada sejarah perkembangan Sarekat Islam di Tasikmalaya memiliki berbagai bentuk. Masyarakat Tasikmalaya sebelum memasuki era pergerakan nasional masih bersifat tradisional. Hal ini dapat dilihat dari struktur kelas yang didominasi oleh kaum islam tradisional. Sekolah yang berkembang di Tasikmalaya pada awalnya hanyalah sekolah pesantren tradisional. Masyarakat terbentuk menjadi sebuah objek sosial yang religius. Selain religius, masyarakat Tasikmalaya juga masih bersandar pada unsur mistis di lingkungannya. Semua hal selalu masyarakat benturkan ke arah mistis.

Salah satu pola pikir mistis yang sudah membudaya adalah harapan masyarakat akan ramalan yang berisikan akan datangnya ratu adil. Ratu adil merupakan sebuah subjek imajinatif yang direpresentasikan oleh masyarakat sebagai juru selamat (penolong). Saat itu, kondisi masyarakat sedang menderita di bawah hegemoni pemerintahan Hindia Belanda. Masyarakat saat itu selalu mendambakan datangnya sosok juru selamat.

Harapan tersebut lambat laun teralisasi disaat munculnya beberapa organisasi politik di Tasikmalaya. Salah satu organisasi yang menjadi perhatian adalah Sarekat Islam. Sarekat Islam muncul di Tasikmalaya atas dasar latar belakang sosial yang religius. Masyarakat antusias menyambut lahirnya Sarekat Islam karena ideologi Islam dan visi misi yang progresif. Tak heran jika banyak masyarakat yang menganggap Sarekat Islam sebagai sebuah representasi ratu adil. Oleh karena itulah, masyarakat mulai berpartisipasi dalam perpolitikan yang diusung oleh sarekat Islam di Tasikmalaya. Anggota Sarekat Islam di Tasikmalaya merupakan yang tertinggi ketiga setelah Cianjur dan Bandung.

## **2.2. Hasil Penelitian yang Relevan**

Hasil penelitian yang relevan bertujuan sebagai acuan peneliti dalam melaksanakan penelitian. Peneliti mengambil beberapa hasil penelitian sesuai dengan fokus penelitian terkait. Hasil penelitian yang relevan tersebut diantaranya:

- 1) Hasil penelitian Endang Muryanti (2011) dengan judul penelitian “Muncul dan Pecahnya Sarekat Islam Di Semarang 1913-1920”. Penelitian ini menjelaskan lahirnya Sarekat Islam di Semarang. Selain itu, penelitian ini mengambil sudut waktu pada tahun 1913-1920. Penelitian Endang Muryanti memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian ini. Persamaanya terlihat dalam penjelasan tentang Sarekat Islam. Endang Muryanti mencoba membahas secara historis Sarekat Islam di Semarang. Sedangkan perbedaanya pada aspek ruang yang dituju. Aspek ruang yang diangkat pada penelitian Endang Mulyanti berlokasi di Semarang. Sedangkan objek yang diangkat oleh peneliti berlokasi di Tasikmalaya. Peneliti mencoba memberikan tanggapan terhadap perbedaan dan persamaan hasil penelitian yang relevan ini. Penelitian ini mengambil periodisasi yang terlalu pendek. Pembahasan mengenai Sarekat Islam di Semarang peneliti rasa memiliki

lokus pembahasan yang lebih luas. Peneliti mencoba membandingkan hasil penelitian Endang ini dengan penelitian dari peneliti itu sendiri. Penelitian dari peneliti yang memiliki fokus Sarekat Islam tingkat lokal memiliki perbedaan dalam segi pembendaharaan data sumber terkait. Peneliti merasa masih terhambat dalam akses pencarian data.

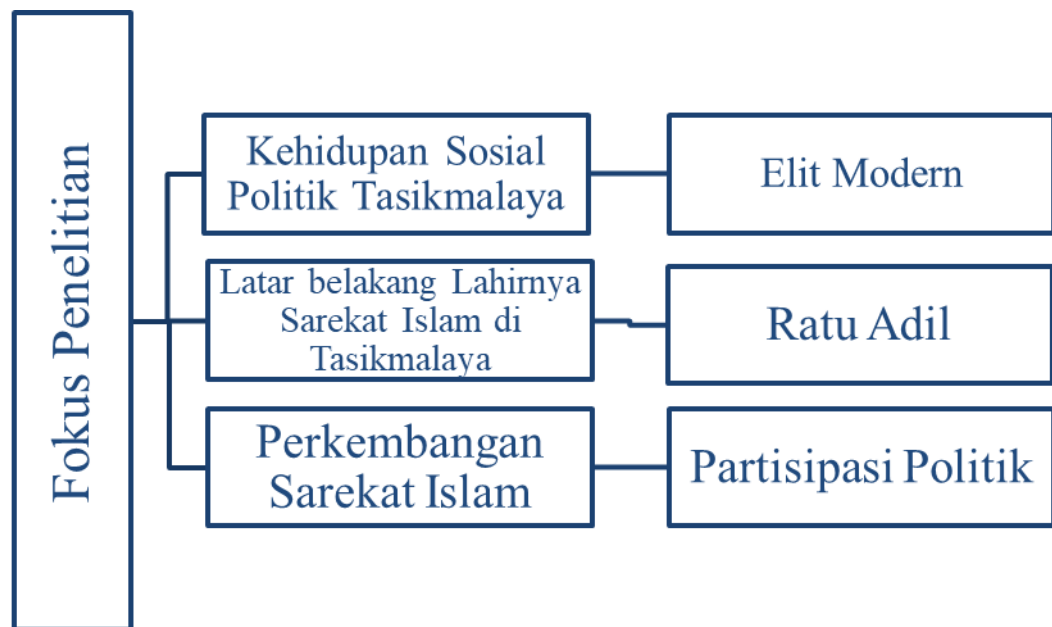
- 2) Hasil penelitian Rifki Adiyana (2016) dengan judul penelitian “Peranan Paguyuban Pasundan Dalam Perkembangan Pendidikan Di Tasikmalaya Pada Tahun 1913-1942”. Rifki menjelaskan dalam penelitiannya bahwa paguyuban pasundan memiliki peranan besar dalam bidang pendidikan di kota Tasikmalaya. Selain itu, aspek waktu yang diangkat yaitu meliputi tahun 1913-1942. Penelitian Rifki memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian ini. Persamaannya terlihat pada objek yang digunakan yaitu Tasikmalaya. Perbedaan yang terlihat dari penelitian ini yaitu fokus penelitian mengenai paguyuban pasundan.
- 3) Hasil penelitian Yuling Malo (2017) dengan judul penelitian Organisasi Papua Merdeka tahun 1960-1969. Penelitian ini menjelaskan secara historis perkembangan organisasi Papua Merdeka dengan kurun waktu 1960-1969. Penelitian dari Yuling Malo memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian ini. Persamaan terlihat dalam menjelaskan tentang gerakan organisasi papua merdeka pada masa penjajahan kolonial Belanda sampai dengan era awal kemerdekaan Indonesia dan pengaruh dari organisasai papua merdeka bagi masyarakat Papua dan pemerintahan Indonesia. Organisasi Papua Merdeka tidak terlepas dari atas kepemimpinan Indonesia yang pada masa itu berada di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno. Organisasi Papua Merdeka juga harus tidak dapat berkembang secara efektif menjadi kelompok penekan pemerintah dikarenakan pemerintahan Indonesia pada masa itu dan memberikan perlawanan secara kuat.

### **2.3. Kerangka Konseptual**

Kerangka konseptual merupakan gambaran atau konsep dari permasalahan yang akan diteliti. Pemikiran dalam penelitian ini disatukan menjadi suatu kerangka untuk memudahkan arah penulisan. Kerangka biasanya mampu digambarkan secara keseluruhan melalui kombinasi antara topik penelitian dan landasan teori. Teori digunakan sebagai dasar peneliti untuk membahas topik penelitian terkait. Selain itu, teori juga berguna agar peneliti lebih terarah untuk mendeskripsikan fokus penelitian secara historis.

Ketiga teori yang diangkat oleh peneliti memiliki relevansi yang mendasar terhadap pembahasan terkait kerangka konseptual. Pada teori pertama, peneliti mencoba membedah struktur kelas di Tasikmalaya pada awal abad ke-20. Kelas modern sangat berpengaruh dalam menggambarkan masyarakat yang mampu menerima perubahan. Hal inilah yang menyebabkan beberapa organisasi politik di Tasikmalaya mampu berkembang pesat. Teori Kedua, Peneliti mencoba mencari dasar dari sebuah tindakan masyarakat Tasikmalaya dalam merespon tumbuhnya Sarekat Islam. Masyarakat Islam tergerak dalam sebuah paradigma lokal yang disebut sebagai *ratu adil*. Masyarakat yang saat itu sedang mengalami era kolonialisasi Belanda sangat menantikan datangnya sebuah juru selamat. Sarekat Islam dianggap oleh masyarakat Tasikmalaya sebagai juru selamat dan representatif dari imam mahdi (*mahdisme/ratu adil*).

Kerangka tersebut diantaranya, yaitu: Pertama, menjelaskan tentang Tujuan penelitian untuk mengetahui perkembangan kaum elit pada masyarakat pribumi di tasikmalaya, Kedua Tujuan penelitian untuk mengetahui Munculnya sarikat islam di tasikmalaya, Ketiga, Tujuan penelitian untuk mengetahui Dampak terbentuknya Sarekat Islam di tasikmalaya.



**Gambar 2.3. Kerangka Konseptual**

#### **2.4 Pertanyaan Penelitian**

Pertanyaan penelitian merupakan suatu bentuk penegasan masalah dari rumusan masalah yang berbentuk kalimat tanya dan harus dipecahkan dalam menjadi sebuah jawaban pertanyaan penelitian dapat dinyatakan sebagai pertanyaan sederhana mengenai hubungan antara dua atau lebih variable. Adapun pertanyaan dalam penelitian ini yaitu :

- 1) Bagaimana latar belakang munculnya Sarekat Islam di Tasikmalaya pada Tahun 1911-1920?
- 2) Bagaimana perkembangan Sarekat Islam di Tasikmalaya pada Tahun 1911-1920?
- 3) Bagaimana dampak dari perkembangan Sarekat Islam di Tasikmalaya pada Tahun 1911-1920?